



## PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Negr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh;

**Pemohon I;**

**Pemohon II;**

Selanjutnya **Para Pemohon** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan Register Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Negr pada tanggal 02 Mei 2024 yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara dibawah tangan menurut agama Islam pada tanggal 27 Februari 2020 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Tanjung Selor, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Abdul Muis dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing beragama Islam yang bernama: 1. Jarni, 2. Raidi, serta mahar berupa uang Rp21.000.000.00 (dua puluh satu juta rupiah) dibayar tunai, namun saat itu tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Negr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan disebabkan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 10 Agustus 2021;
  4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 28 September 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 82/03/IX/2021, tanggal 28 September 2021;
  5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus administrasi pembuatan akta kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena anak tersebut lahir dulu sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi pada Kantor Urusan agama Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai dasar hukum;
  6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXX**, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 10 Agustus 2021 adalah anak sah dari perkawinan antara Pemohon I (**XXXX**) dengan Pemohon II (**XXXX**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Negr



#### Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon secara *inperson* datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukannya tersebut berdasarkan Hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

#### A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6306111608940001 atas nama **XXXX**(Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 11-11-2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6306076601040003 atas nama **XXXX** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 06-12-2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 82/03/IX/2021 atas nama **XXXX** (Pemohon I) dan **XXXX** (Pemohon II), yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 28 September 2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.3).



4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir yang diterbitkan oleh Puskesmas Bajayau Nomor :440.2/05/Tu/Bides/PKM.BJY/VIII/2021 tanggal 11 Agustus 2021, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh ketua majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.4).
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306111011210001 atas nama **XXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 10-11-2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.5).

B. Bukti Saksi;

1. **XXXX**, lahir di Tanjung Selor, 07 April 1972, NIK. 6306110704720001, umur 52 tahun, Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri dan saksi hadir langsung pada saat pernikahan tersebut sekaligus menjadi wali Pemohon II;
  - Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 27 Februari 2020 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Tanjung Selor, namun pernikahan tersebut tidak tercatat;
  - Bahwa, alasan Para Pemohon melakukan nikah sirri karena Pemohon II masih di bawah umur;
  - Bahwa, yang menjadi wali nikah saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah. Dihadiri 2 orang saksi laki-laki, beragama Islam, dan dewasa yang bernama Jarni dan Raidi;



- Bahwa, mahar saat pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, mushaharah, maupun sesusuan;
  - Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 28 September 2021 di KUA Daha Barat;
  - Bahwa, Para Pemohon tidak pernah berpisah tempat tinggal atau bercerai;
  - Bahwa, Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki selain Pemohon I;
  - Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 10 Agustus 2021 yang terlahir sebelum Para Pemohon menikah secara resmi;
  - Bahwa, saksi melihat langsung Pemohon II menjalani masa kehamilan anaknya tersebut;
  - Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
  - Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan atas permohonan asal usul anak tersebut, karena anak tersebut benar anak kandung Para Pemohon;
  - Bahwa, Para Pemohon selama ini telah menjadi orang tua yang bertanggung jawab, mendidik, dan mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
2. **XXXX**, lahir di Tanjung Selor, 06 Juni 1978, NIK. 6306114606780001, umur 46 tahun, Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II dan tahu Para Pemohon adalah suami istri karena saksi hadir langsung pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 27 Februari 2020 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Tanjung Selor, namun pernikahan tersebut tidak tercatat;
- Bahwa, alasan Para Pemohon melakukan nikah sirri karena Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah. Dihadiri 2 orang saksi laki-laki, beragama Islam, dan dewasa yang bernama Jarni dan Raidi;
- Bahwa, mahar saat pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, mushaharah, maupun sesusuan;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 28 September 2021 di KUA Daha Barat;
- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah berpisah tempat tinggal atau bercerai;
- Bahwa, Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki selain Pemohon I;
- Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 10 Agustus 2021 yang terlahir sebelum Para Pemohon menikah secara resmi;
- Bahwa, saksi melihat langsung Pemohon II menjalani masa kehamilan anaknya tersebut;

Halaman 6 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan atas permohonan asal usul anak tersebut, karena anak tersebut benar anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon selama ini telah menjadi orang tua yang bertanggung jawab, mendidik, dan mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan dengan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukannya tersebut berdasarkan Hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku demi kebaikan dan keteraturan jalannya pemeriksaan perkara sebagaimana bunyi Pasal 156 R.Bg *"jika ketua menganggap perlu agar perkara dapat berjalan dengan baik dan teratur, maka pada saat pemeriksaan perkara, dia dapat memberikan nasehat kepada kedua belah pihak dan guna menunjukkan upaya hukum dan keterangan yang dapat mereka pergunakan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam maka Para Pemohon mempunyai kepentingan dengan perkawinan itu dan



mempunyai hak untuk mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama, maka secara formil permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya agar anak yang bernama Muhammad Ihsan bin Karliansyah ditetapkan sebagai anak sah dari pernikahan antara Para Pemohon, dikarenakan Para Pemohon kesulitan dalam pengurusan Akta Kelahiran anak tersebut, oleh karena anak tersebut terlahir dari pernikahan yang tidak tercatat. Dengan demikian, Para Pemohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon benar berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara. Dengan demikian, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon telah terikat dalam suatu





perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir, yang dikeluarkan/dibuat tidak dihadapan pejabat atau tidak ada campur tangan pejabat atas pembuatannya serta sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diakui isi dan tanda tangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta di bawah tangan yang nilainya disamakan dengan akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut telah ditambah dan didukung oleh keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon harus dinyatakan bahwa surat tersebut menjelaskan kelahiran anak atas nama XXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 10 Agustus 2021 yang merupakan anak kandung Para Pemohon yang dilahirkan sebelum Para Pemohon menikah secara resmi di Kantor Urusan agama Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sarlan (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga fotokopi surat tersebut harus dinyatakan bahwa benar Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai istri dengan status perkawinan adalah kawin tercatat, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan Para Pemohon, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta



secara terpisah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil permohonan Para Pemohon tentang permohonan asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon, serta dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon (bukti surat dan saksi) di persidangan ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Para Pemohon telah pernah menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 27 Februari 2020 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Tanjung Selor Kecamatan Daha Barat dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah kemudian taukil kepada Penghulu kampung;
- Bahwa, saksi nikahnya adalah 2 orang saksi laki-laki, beragama Islam, dan dewasa yang bernama Jarni dan Raidi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Para Pemohon menikah sirri pada saat itu karena Pemohon II masih di bawah umur sehingga tidak bisa menikah secara resmi di KUA.
- Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Halaman 10 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Negr



- Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri yang sah yang menikah ulang di KUA Daha Barat pada tanggal 28 September 2021;
- Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, mushaharah, maupun sesusuan;
- Bahwa, Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki selain Pemohon I;
- Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama XXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 10 Agustus 2021 adalah anak yang lahir sebelum Para Pemohon menikah secara resmi dan sampai sekarang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon dengan penuh tanggung jawab;
- Bahwa, anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa, anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran, sedangkan Para Pemohon menghendaki bahwa anak tersebut adalah sebagai anak sah dari perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, yang demikian itu perkawinan tersebut menurut hukum adalah perkawinan yang sah secara materiil atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa karenanya anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon tersebut adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara serta merta harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah



anak yang sah dari perkawinan Para Pemohon sesuai Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penetapan asal usul anak Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar Hukum Islam Ibnu Qudamah dalam Kitabnya Al-Mughni jilid VIII halaman 96 dan pendapat Wahbah Zuhaili dalam Kitabnya Al-Fiqih al-Islami wa adillatuhu jilid V halaman 690 yang menyatakan *“penetapan asal usul anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak sehingga untuk membuktikannya cukup dengan pembuktian adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Cara lain untuk membuktikan asal usul anak adalah dengan pengakuan (iqrar)”*;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu Jilid V halaman 690, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، فمتى ثبت  
الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زوجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل  
في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : “pernikahan baik yang sah maupun yang *fasid* adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fasid* (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon terkait asal usul anak tersebut telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak yang bernama XXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 10 Agustus 2021 adalah anak



yang lahir sebelum perkawinan ulang Para Pemohon yang dilangsungkan secara resmi di Kantor Urusan agama Kecamatan Daha Barat, maka oleh karena yang demikian itu harus dinyatakan anak tersebut adalah anak yang sah dari perkawinan antara Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta tidak ternyata ada pengingkaran dari Pemohon I sehingga permohonan Para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) KHI, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masih dalam urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 10 Agustus 2021**, adalah anak yang sah dari perkawinan antara Pemohon I (**XXXX**) dengan Pemohon II (**XXXX**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh **Abdul Hamid, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Lissa Dewi Andini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 13 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Negr



pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Mustaqimah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Abdul Hamid, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.**

**Lissa Dewi Andini, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mustaqimah, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp30.000,00        |
| 2. Proses         | : Rp75.000,00        |
| 3. Panggilan      | : Rp400.000,00       |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00        |
| 5. Redaksi        | : Rp10.000,00        |
| 6. Meterai        | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah            | Rp545.000,00         |

(lima ratus empat lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)